

**Judul** : Komisi XIII tegus Menteri HAM Natalius Pigai  
**Tanggal** : Kamis, 06 Februari 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

# Komisi XIII Tegur Menteri HAM Natalius Pigai

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah anggota Komisi XIII DPR menegur Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai karena dinilai tidak bekerja optimal selama 100 hari kerja pemerintah pusat. Sejumlah masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan proyek strategis nasional, seperti yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten, hingga kini belum selesai.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Demokrat, Raja Faisal Manganju Sitorus, mempertanyakan kinerja Natalius Pigai yang menurut dia menurun. "Saya ingin melihat Pak Menteri seperti dulu ketika menjadi komisioner di Komnas HAM. Kok, sekarang, setelah menjadi menteri, jadi kurang lantang berbicara?" katanya dalam rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), yang turut dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai.

Alih-alih membuat langkah strategis, Raja Faisal menilai

Natalius Pigai diam saja dan tidak mengambil sikap ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Rempang dan kasus pagar laut di Tangerang. Ia juga meminta Pigai agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Teguran untuk Pigai juga disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mafirion. Ia menilai, Pigai tidak bekerja secara optimal dalam 100 hari kerja pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mafirion, dalam lima tahun terakhir, terdapat 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang menjadi korban kekerasan psikologis akibat proyek strategis nasional. Dua kasus dugaan pelanggaran HAM yang paling hangat terjadi yaitu kasus Rempang dan pagar laut di Tangerang yang telah merugikan nelayan.

Selain itu, terdapat 36 kasus dugaan pelanggaran HAM di In-

donesia yang melibatkan aparat kepolisian, 30 kasus melibatkan pemerintah daerah, dan 48 kasus melibatkan anggota TNI.

Mafirion meminta pemerintah bertindak lebih tegas dalam melindungi masyarakat. "Coba bayangkan itu kampung kita sendiri yang sudah kita tempati bertahun-tahun tiba-tiba ada orang datang dan meminta kita pindah. Apakah itu bisa diterima? Saya tidak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM terhadap kasus Rempang. Apa yang dilakukan Menteri HAM ketika melihat nenek-nenek menjadi tersangka saat rumahnya dirampas?" katanya.

### Lindungi masyarakat

Mafirion memahami bahwa pemerintah memiliki sejumlah proyek pembangunan di daerah. Ia pun menegaskan, dirinya tidak meminta Pigai menghentikan pembangunan atau membuat kebijakan yang merugikan investor. "Saya hanya meminta Pak Menteri melindungi masyarakat," katanya.

Mafirion pun meminta Pigai turun ke lapangan untuk bertemu masyarakat di Rempang dan Tangerang serta mendengarkan keluh kesah mereka. Ia juga meminta Pigai menjadi penengah, membantu masyarakat mendapatkan hak-haknya dan tak tergerus pembangunan.

"Kasus Rempang ini harus diselesaikan dengan baik. Pemerintah tidak perlu membuat perusahaan menjadi bangkrut, tetapi harus memastikan hak-hak masyarakat dilindungi," kata Mafirion.

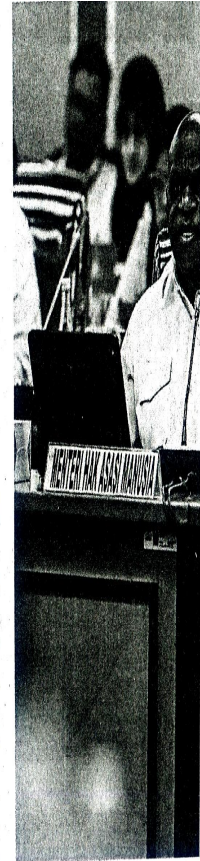
Menanggapi teguran dari DPR, Pigai mengatakan, pihaknya menyadari ada keterbatasan menindak kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah proyek pembangunan nasional. Hal itu terjadi karena belum ada payung hukum yang memadai, misalnya terkait perlindungan HAM serta kaitannya dengan pembangunan atau perlindungan HAM dan lingkungan.

"Selama ini, kita berkuat dengan pembangunan ekonomi, sosial, sipil, dan budaya. Na-

mun, kita kekurangan instrumen hukum untuk memastikan kelestarian lingkungan dan proteksi terhadap ancaman lingkungan," kata Pigai.

Guna memastikan tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, Pigai berjanji akan membuat regulasi untuk memastikan perlindungan HAM terhadap masyarakat. "Kalau tidak ada regulasi, sama saja seperti rekomendasi biasa. Ini ingin saya seriuskan dalam lima tahun ke depan, kita hasilkan aturan berkaitan dengan HAM dan lingkungan serta HAM dan pembangunan," ujarnya.

Pigai juga mengatakan, dalam jangka pendek, pihaknya menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi dan memberikan kompensasi korban pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM berat maupun sedang, atau yang biasa disebut dengan korban konflik sosial. "Itu adalah bagian dari upaya kami menjembatani rakyat dan negara tidak dalam konteks peradilan," kata Pigai. (DNA)



Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai saat mengikuti rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (DNA)